

Masyarakat Perlu Tingkatkan Imunitas terhadap Hoaks

Thursday, 14 Maret 2019 WIB, Oleh: gloria



Berbagai upaya struktural telah dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi untuk melawan penyebaran hoaks yang intensitasnya semakin tinggi beberapa waktu terakhir.

Menurut Dosen FISIPOL UGM, Abdul Gaffar Karim, upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dikembalikan kepada masing-masing individu, bagaimana mereka berupaya mencerdaskan diri sendiri dan meningkatkan imunitas terhadap hoaks.

“Hoaks tidak menjadi sesuatu yang berbahaya selama kita tidak mengizinkan hal itu mengganggu pikiran kita,” tutur Gaffar dalam Sarasehan Kebangsaan “Mengelola Kabar Bohong dan Distorsi Informasi dalam Politik Elektoral” yang diadakan Rabu (13/3) di Selasar Barat FISIPOL.

Pembahasan isu ini berangkat dari riset yang dilakukan oleh Research PolGov di Jawa Barat dan Maluku yang menemukan bahwa peredaran hoaks yang mencakup jalur-jalur daring seperti media sosial dan media pesan serta jalur relasi langsung seperti pertemuan warga semakin mengkhawatirkan dari segi luasan dan sifatnya.

Untuk meningkatkan imunitas individu agar tidak terpengaruh hoaks, Gaffar menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membatasi informasi yang diterima hanya melalui sumber-sumber yang kredibel. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya ruang yang mempertemukan masyarakat dengan pandangan yang berbeda untuk saling berdiskusi dan mengonfirmasi isu-isu yang beredar, agar tidak terjebak dalam narasi yang berat sebelah.

“Kalau kita ada di dalam grup yang anggotanya hanya pendukung Jokowi, pasti hoaks yang beredar adalah seputar Prabowo, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau ada dari kedua kubu, kalau ada hoaks

yang beredar bisa saling mengonfirmasi, dan pemahaman kita lebih terbuka,” terangnya.

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, menyebutkan bahwa pihaknya mencatat ada 997 hoaks yang beredar di sepanjang tahun 2018, hampir separuh di antaranya berkaitan dengan isu politik, sosial, dan SARA.

Selain berpotensi merusak kerukunan bangsa, peredaran hoaks dan distorsi informasi juga membahayakan proses demokrasi di dalam pemilihan umum karena mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu yang penting.

“Di media sosial orang lebih banyak berurusan dengan isu yang remeh temeh, isu yang penting justru jarang sekali muncul,” ujar Septiaji.

Sementara itu, pengamat sosial dan politik, Iqbal Aji Daryono, mengungkapkan bahwa perang melawan hoaks bukanlah perang antara orang pintar dan orang bodoh, melainkan perang antara civil society melawan industri. Ia menyebut 3 pihak yang diuntungkan oleh persebaran hoaks, yaitu media massa, penyedia media sosial, serta politisi.

“Hoaks tidak lepas dari kepentingan para politisi. Mereka butuh itu untuk konsolidasi internal, membangun musuh bersama, dan satu lagi yang teman-teman mungkin tidak sadar, yaitu untuk efisiensi pembiayaan politik,” jelas Iqbal.

Karena salah satu tantangan di dalam perlawanan kabar bohong terletak pada isu literasi, ia menyebut bahwa peran melawan hoaks tidak bisa diselesaikan secara instan. Perlawanan ini memerlukan upaya taktis yang hasilnya baru akan dilihat beberapa tahun ke depan.

Sarasehan ini diselenggarakan atas kerja sama antara Research Center for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM, dengan MAFINDO. Selain untuk memperluas ruang bertemu secara sosial agar masyarakat bisa saling melakukan klarifikasi atas kabar yang beredar, acara ini juga menjadi gerakan kampanye publik untuk memberikan pemahaman akan pentingnya menyaring berita di tahun politik. (Humas UGM/Gloria)

Berita Terkait

- [Buah Salak Potensial Tingkatkan Imunitas Tubuh](#)
- [Identitas Budaya Lokal Semakin Menguat](#)
- [Menkominfo Ajak Masyarakat Lawan Hoaks](#)
- [Presiden Diminta Turun Tangan, Ada Upaya Hambat Pemberantasan Korupsi](#)
- [CfDS UGM Ungkap Tiga Ancaman Siber Pemilu 2019](#)